

STRATEGI PENINGKATAN KESEJATERAAN TRANSMIGRAN DI KABUPATEN KONAWE UTARA

Abd. Azis Muthalib

Fak. Ekonomi dan Bisnis - Universitas Halu Oleo

Rostin

Fak. Ekonomi dan Bisnis - Universitas Halu Oleo

Asrip Putera

Fak. Ekonomi dan Bisnis - Universitas Halu Oleo
asripputera@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi peningkatan kesejahteraan transmigran di Kabupaten Konawe Utara. Metode penelitian ini adalah survey kepada seluruh wilayah transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara baik yang masih berbentuk UPT (unit pemukiman transmigrasi) maupun yang sudah menjadi desa sebagai situs penelitian. Metode analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa; Strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi yaitu; pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi, penguasaan keterampilan dan teknologi, strategi intensifikasi dan integrasi lahan (strategi integrasi antara pertanian dan peternakan dan strategi pemilihan komoditas usahatani).

Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi, *Strategi, Kab. Konawe Utara*

Abstract

This study aims to identify strategies to improve the welfare of transmigrants in Konawe Utara Regency. This research method is a survey of all transmigration areas in North Konawe Regency both in the form of UPT (transmigration settlement units) and those that have become villages as research sites. The data analysis method uses an interactive model. The results of the study illustrate that; Strategies that can be taken to improve the welfare of transmigration residents are; establishment and strengthening of economic institutions, mastery of skills and technology, land intensification and integration strategies (integration strategies between agriculture and animal husbandry and farm commodity selection strategies).

Keywords: Transmigration Community Welfare, Strategy, North Konawe

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi daerah tujuan atau penempatan transmigran. Beberapa kecamatan di Kabupaten Konawe Utara terdapat desa/wilayah transmigran, seperti Kecamatan Wiwirano, Langgikima, Oheo, Asera, Sawa, dan Motui.

Banyaknya transmigran di Kabupaten Konawe Utara merupakan “modal” dalam pembangunan sekaligus “masalah/beban” yang harus di kelolah dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, sehingga dapat menjadi “modal” dalam pengembangan Kabupaten Konawe Utara dan tidak menjadi “masalah/beban”. Tentu, untuk menjadikan sebagai “modal” dalam pembangunan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara harus mampu mengelolah dengan pilihan strategi yang tepat sesuai dengan karakteristik wilayah dan transmigran sehingga potensi sumber daya yang dimiliki oleh transmigran dapat maksimal.

Dibeberapa desa/wilayah transmigran di Kabupaten Konawe Utara dapat dikatakan relative mempunyai kehidupan yang baik dan telah memberikan dampak yang positif, seperti; turut meringankan pengangguran, kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan sekaligus mengembangkan wilayah tertinggal dengan membuka isolasi wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan sejumlah desa-desa baru. Namun, di beberapa desa/wilayah justru mempunyai kehidupan yang memprihatinkan. Artinya masih banyak desa/wilayah transmigran yang harus dikelola dengan strategi yang tepat, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan hidup transmigran.

Fenomena kehidupan transmigran di Kabupaten Konawe Utara yang masih memprihatinkan dapat terlihat masih banyaknya permukiman-permukiman transmigrasi yang sudah lama dibangun tetapi sampai saat ini belum berkembang bahkan cenderung “mati” dalam arti transmigran tersebut “kembali kekampung asal atau menjual lahan pada orang lain”. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi pengembangan kawasan transmigrasi guna mempercepat pertumbuhan sehingga tingkat kesejahteraan transmigran dapat ditingkatkan.

Terdapat beberapa wilayah/desa transmigran yang terdapat di Konawe Utara yang dapat dikatakan sebagai “beban” pemerintah kabupaten dalam pembangunan. Perumahan-perumahan yang tidak terurus dan lahan yang sudah tidak produktif, infrastruktur desa yang kurang terawat, begitu juga fasilitas public yang relative masih kurang kondisi demikian harus menjadi “pekerjaan rumah” Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam hal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah dipandang kurang memberikan perhatian terhadap transmigran, khususnya pemerintah kabupaten yang belum mengelolah wilayah/desa transmigran dengan strategi yang tepat. Perbedaan karakteristik warga transmigran harus dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi yang tepat. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah letak geografis dan potensi sumber daya alam disetiap wilayah/desa transmigran harus menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten dalam menentukan strategi yang tepat untuk pemberdayaan warga transmigran disetiap desa/wilayah masing-masing.

Sementara disisi lain pemerintah kabupaten juga menghadapi beberapa permasalahan seperti; keterbatasan sumberdaya manusia, kemampuan keuangan kabupaten, infrastruktur desa yang belum tersedia, dukungan masyarakat sekitar wilayah/desa transmigran, motivasi transmigran juga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah kabupaten dalam mengelolah/mengembangkan tingkat kesejahteraan transmigran di Kabupaten Konawe Utara.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian telah memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan pembangunan di desa/wilayah transmigran yakni: dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan, dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten dan mendorong peran serta masyarakat.

Upaya pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi peningkatan kesejahteraan transmigran di Kabupaten Konawe Utara dengan fokus penelitian pada identifikasi Strategi/upaya peningkatan kesejahteraan transmigran.

2. METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif atau dikategorikan dalam metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survei yaitu menggambarkan, menjelaskan dan menginterpretasikan suatu fenomena yang terjadi pada suatu objek

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara, dengan fokus pada wilayah-wilayah transmigrasi, yakni; Kecamatan Wiwirano, Laggikama, Oheo, Asera, Sawa, dan Motui. Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan selama lima (5) bulan sejak Pebruari 2019 sampai Juni 2019.

Data merupakan informasi yang diperoleh dari suatu penelitian, dimana data tersebut diperlukan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif pemecahan yang tepat, adapun data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini adalah data yang bersifat data kualitatif yaitu untuk diperlukan dalam menjelaskan berbagai gambaran dan peristiwa sehubungan dengan pelaksanaan penelitian.

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan wilayah dan warga transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara. Sebagaimana diketahui di beberapa kecamatan terdapat wilayah transmigrasi, yakni: Kecamatan Wiwirano, Laggikama, Oheo, Asera, Sawa, dan Motui. Mengingat keterbatasan waktu dan pembiayaan maka penelitian ini melakukan sampel pada beberapa warga transmigrasi yang dianggap dapat mewakili atau merepresentasikan karakteristik populasi yang ada, sehingga data yang didapatkan benar valid dan menjawab permasalahan penelitian.

Metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara dokumentasi, kemudian untuk pengumpulan data primer dengan cara *observasi* dan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai instrument untuk mengarahkan wawancara dan mendapatkan data yang sesuai untuk kebutuhan analisis.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tehnik interaktif yang diadopsi dari model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992)

Tahapan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yakni:

1. *Reduksi data* adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan lapangan.
2. *Penyajian data* adalah kegiatan penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, yang dibantu dengan metrik, grafik, table, dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh.
3. *Penarikan kesimpulan* adalah mencari arti, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.
dapat dilihat pada bagian “Hasil dan Pembahasan”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi/Upaya Peningkatan Kesejahteraan Transmigran

Untuk meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi di berbagai daerah transmigrasi dibutuhkan beberapa strategi atau upaya khususnya dari pemerintah kabupaten, yakni:

1. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi

Pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat atau warga transmigrasi merupakan salah satu strategi atau upaya alternative yang dapat diterapkan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi. Kelembagaan ekonomi yang dimaksud adalah pembentukan suatu wadah yang bergerak pada peningkatan pendapatan warga transmigrasi, dengan wadah tersebut diharapkan akan mampu memberikan “kekuatan” baru terhadap warga transmigrasi dalam berusaha atau bekerja.

Kelembagaan yang dimaksud dapat berupa koperasi, kelompok tani atau semacam organisasi yang dapat menghimpun “kekuatan” warga transmigrasi sehingga mampu mengelolah potensi sumber daya yang ada dengan maksimal. Beberapa bentuk kelembagaan ekonomi yang dapat menjadi “kekuatan” bagi warga transmigrasi seperti:

a. Koperasi

Pembentukan koperasi simpan pinjam atau koperasi unit desa (KUD) yang mempunyai unit usaha simpan pinjam, penyediaan pupuk dan bibit untuk tanaman jangka pendek, seperti: sayuran, pisang dan buah-buahan. Dengan adanya koperasi maka kebutuhan dana usaha atau modal awal dalam berusaha akan dapat teratasi, disamping itu koperasi dapat menjadi wadah untuk menampung (menjual) hasil-hasil panen warga transmigrasi.

Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pembentukan koperasi dibutuhkan keterlibatan beberapa pihak, seperti: dinas koperasi dan UKM, perguruan tinggi dan LSM (lembaga swadaya masyarakat). Dengan keterlibatan beberapa pihak maka kelemahan-kelemahan dalam pembentukan koperasi atau yang sering terjadi akan dapat diminimalisir, sehingga tujuan pembentukan koperasi akan dapat tercapai. Keterlibatan dinas koperasi dan UKM serta perguruan tinggi akan mampu memberikan pemahaman mengenai tujuan dan cara mengelolah koperasi sehingga dapat memberikan manfaat terhadap seluruh anggota.

Koperasi berbeda dengan lembaga atau bentuk usaha lainnya (seperti; UD (usaha dagang, perseroan terbatas atau CV) khususnya dalam hal kepengurusan atau pengambilan kebijakan, kepemilikan dan pembagian keuntungan. Koperasi merupakan usaha bersama seluruh anggota, artinya tidak hanya dimiliki oleh sebagian orang atau kelompok tertentu tetapi merupakan milik seluruh anggota sehingga pengambilan kebijakan atau system pengelolaan pun dapat dilakukan oleh seluruh anggota dan tidak terbatas pada orang tertentu saja. Artinya seluruh anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam pengambilan keputusan atau kebijakan tentang usaha koperasi. Istilah yang lebih populer adalah “*one man one vote*” (satu orang satu suara), artinya setiap anggota mempunyai satu suara yang sama dalam pengambilan kebijakan pengelolaan koperasi atau setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam pengambilan kebijakan usaha koperasi.

Pembentukan koperasi tidak mempersyaratkan banyaknya modal yang ada atau dimiliki koperasi tetapi mempersyaratkan adanya sejumlah orang (anggota) koperasi. Artinya pembentukan koperasi berbasiskan pada adanya kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, namun bukan berarti modal tidak penting dalam koperasi tetapi faktor

modal atau dana bukan menjadi faktor penentu utama tetapi adanya sejumlah orang yang menjadi anggota merupakan faktor utama, sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi lebih berorientasi pada manusia dan bukan modal.

Hak dan kewajiban yang sama seluruh anggota koperasi menyebabkan pembagian keuntungan usaha juga dilakukan dengan sama kepada seluruh anggota, sesuai dengan partisipasi setiap anggota. Partisipasi yang dimaksud adalah sejumlah transaksi yang dilakukan oleh anggota terhadap setiap jenis usaha koperasi. Artinya semakin aktif seorang anggota dalam berpartisipasi atau menggunakan jasa atau barang yang dikelola atau disediakan koperasi maka pembagian keuntungan juga akan mendapatkan porsi atau persentase yang lebih tinggi.

Keuntungan dalam koperasi dikenal dengan istilah SHU (sisa hasil usaha), SHU merupakan sejumlah dana yang merupakan keuntungan dari seluruh kegiatan yang dilakukan koperasi, sehingga dapat dikatakan bahwa SHU merupakan pengurangan antara seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya dan pajak. Besaran SHU akan tergantung keaktifan usaha yang dilakukan oleh koperasi, dan tentunya usaha koperasi akan berkembang sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dari anggota, bila anggotanya tidak mempunyai partisipasi terhadap seluruh kegiatan usaha baik jasa maupun barang maka usaha koperasi tersebut akan mengalami stagnan atau “mati suri”.

Berdasarkan kelebihan yang dimiliki koperasi maka dianggap sangat tepat untuk terbentuk koperasi di wilayah atau daerah transmigrasi yang sebagian besar mempunyai modal yang relative terbatas, hal lain karena koperasi tidak mempersyaratkan ketersediaan modal yang banyak, namun lebih mempersyaratkan adanya ikatan emosional yang relative sama, seperti ikatan emosional kesukuan, agama, wilayah yang lebih penting adalah kepentingan ekonomi atau usaha yang sama. Sehingga dengan adanya ikatan emosional yang sama akan memberikan “kekuatan” atau menjadi modal dasar pembentukan koperasi yang lebih bernuansa pada kebersamaan dan kekeluargaan.

Adanya kepentingan ekonomi yang sama antar sesama anggota akan menghidupkan partisipasi anggota, hal tersebut disebabkan sesama anggota mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, seperti sesama petani sayuran, peternak sapi, petani buah-buahan, dan lain sebagainya. Tentunya koperasi yang dibentuk harus mempunyai unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan seluruh anggota, sehingga anggota dapat berpartisipasi aktif terhadap seluruh unit usaha koperasi tersebut.

Manfaat berikutnya bila ada koperasi “aktif” di setiap wilayah atau daerah transmigrasi akan membantu warga transmigrasi dalam hal pemasaran hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang dimiliki warga transmigrasi. Koperasi dapat dijadikan sebagai “pengumpul” hasil-hasil produksi warga transmigrasi yang selanjutnya akan dipasarkan atau disalurkan pada konsumen atau pasar yang mempunyai harga yang lebih tinggi, sehingga warga transmigrasi dapat menikmati nilai lebih (nilai tambah) dibandingkan jika hanya memasarkan hasil produksi secara sendiri-sendiri.

Adanya koperasi di masing-masing wilayah transmigrasi dapat memberikan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan produktivitas bagi warga transmigrasi, dalam hal ketersediaan input (bibit, pupuk, peralatan/mesin), kemampuan pengelolaan usaha

termasuk pemasaran. Beberapa permasalahan yang sering timbul dari pembentukan koperasi, seperti:

- a. Koperasi tidak aktif (tidak berjalan) hanya pada saat-saat awal saja, hal ini dapat diatasi dengan adanya kepentingan ekonomi yang sama pada seluruh anggota. Hal lain adalah perlu diberikan pemahaman yang jelas dari berbagai instansi terkait seperti; dinas koperasi dan UKM, perguruan tinggi kepada warga transmigrasi tentang tujuan dan mafaat pembentukan koperasi.
- b. Hanya pengurus yang menikmati hasil (keuntungan), sedangkan anggota tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersebut dapat dicegah dengan pemberian pemahaman tentang hak dan kewajiban serta nilai-nilai koperasi pada seluruh anggota, sehingga hak dan kewajiban sebagai anggota dapat dipahami dengan baik. Disamping itu perlunya pemberian pelatihan kepada pengurus (seluruh anggota) tentang manajemen pengelolaan koperasi dengan baik atau secara professional sehingga dapat koperasi dapat dikelola dengan baik.
- c. Partisipasi anggota yang kurang. Hal ini dapat di minimalisir dengan memberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat pendirian koperasi terhadap seluruh anggota, disamping itu adanya kepentingan ekonomi atau “ikatan emosional” sesama anggota akan memberikan motivasi yang lebih baik kepada seluruh anggota untuk berpartisipasi demi kemajuan koperasi.
- d. Koperasi hanya berjalan ketika mendapatkan bantuan. Hal tersebut dapat diatasi dengan pemberian pelatihan pengelolaan bantuan (dana) kepada seluruh pengurus (termasuk anggota) koperasi, sehingga persepsi dan mental pengurus (termasuk anggota) koperasi dapat berubah dari yang biasanya menganggap bantuan itu adalah “dana yang dipakai habis” tanpa memanfaatkan bantuan modal/usaha tersebut sebagai momentum untuk berubah sejalan adanya bantuan tersebut. Solusi lain adalah adanya pendampingan dari perguruan tinggi atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk setiap koperasi yang mendapat bantuan usaha sampai program tersebut berhasil, dalam arti koperasi atau warga transmigrasi tersebut dapat mandiri.

Berikut karakteristik warga transmigrasi yang sesuai dengan nilai-nilai koperasi sehingga dapat menjadi “modal dasar atau kekuatan” dalam membentuk koperasi.

Tabel 1 Karakteristik Warga Transmigrasi Yang Sesuai dengan Nilai-Niali Koperasi

No	Nilai-Nilai Koperasi	Karakteristik Warga Transmigrasi
1	Pembentukan koperasi tidak mempersyaratkan adanya modal yang banyak	Sebagian besar warga transmigrasi tidak memiliki modal yang banyak
2	Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama	Struktur masyarakat pada daerah transmigrasi relative homogeny
3	Pembagian SHU (keuntungan)	Warga transmigrasi mempunyai

	berdasarkan partisipasi setiap anggota	mobiltas yang aktif terhadap usaha yang dijalankan
4	Harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama	Mempunyai ikatan emosional, seperti; sesama petani sayur, buah, satu suku, satu agama.

b. Kelompok Tani

Salah satu lembaga ekonomi yang dapat dibentuk di setiap wilayah transmigrasi adalah kelompok tani, adanya kelompok tani akan menjadi wadah bagi warga transmigrasi dalam melakukan aktivitas yang produktif. Kelompok tani tersebut dapat bergerak pada beberapa bidang seperti; bidang perkebunan sayur, buah-buahan atau tanaman yang sifatnya jangka panjang, bidang peternakan (sapi, kambing dan ayam).

Kelompok tani yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan “kekuatan” bagi warga transmigrasi dalam menjalani profesi sebagai petani dan peternak, hal tersebut dikarenakan kelompok tani akan mendapatkan pembinaan dari berbagai instansi terkait untuk meningkatkan produktivitas warga transmigrasi. Pembinaan yang akan diberikan oleh instansi terkait bagi kelompok tani tentu akan berbeda dengan pembinaan yang diberikan bagi setiap warga transmigrasi dengan tanpa kelompok tani.

Adanya kelompok tani memudahkan instansi terkait memberikan program terkait dengan peningkatan produktivitas warga transmigrasi baik dalam bentuk natuna maupun dalam bentuk modal usaha ataupun dalam bentuk pelatihan sehingga warga transmigrasi memiliki keterampilan. Beberapa permasalahan yang sering timbul ketika kelompok tani dibentuk, seperti;

- a. Hanya pengurus yang mendapatkan manfaat atau keuntungan. Hal ini dapat dicegah dengan memberikan pemahaman kepada seluruh anggota kelompok tentang hak dan kewajiban serta tujuan pembentukan kelompok tani. Disamping itu dibutuhkan pendamping yang berfungsi secara maksimal, pendamping tersebut dapat direkrut dari perguruan tinggi atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang benar-benar mempunyai komitmen dan keahlian yang dibutuhkan. Solusi lain adalah adanya regulasi (peraturan) yang jelas tentang manajemen pengelolaan kelompok tani yang dibuat oleh pemerintah daerah (instansi terkait).
- b. Pengelolaan yang belum profesional. Hal ini dapat minimalisir dengan cara instansi terkait memberikan pelatihan manajemen pengelolaan kelompok tani kepada pengurus (seluruh anggota).
- c. Pengawasan yang tidak maksimal dari instansi terkait. Peran dari instansi terkait, seperti: dinas transmigrasi, dinas pertanian, dinas perkebunan, dan lain sebagainya khususnya terkait dengan pengawasan terhadap kelompok tani yang ada perlu di maksimalkan atau ditingkatkan dan tidak terkesan ada “kompromi” antara kelompok tani dengan instansi tertentu penyedia program.

2. Penguasaan Keterampilan dan Teknologi

Beberapa daerah transmigrasi terdapat usaha tertentu yang dikelola oleh warga transmigrasi yang membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu, seperti; kerajinan, perbengkelan, peternakan dan mobiler (pertukangan). Usaha-usaha tersebut sangat potensial

untuk dikembangkan menjadi lebih produktif dan lebih berskala besar, hal tersebut disebabkan oleh tersedianya tenaga-tenaga yang terampil dan mempunyai pasar yang relative terbuka untuk produk-produk tersebut.

Tersedianya tenaga-tenaga yang terampil merupakan modal dasar, disamping itu keuletan dan kegigihan warga transmigrasi juga merupakan faktor yang cukup mendukung untuk pengembangan usaha-usaha yang tersebut, sehingga dukungan dari pemerintah kabupaten (instansi terkait) dalam bentuk program sangat diharapkan untuk pengembangan usaha tersebut.

Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh warga transmigrasi dalam mengelolah usaha-usaha tersebut masih menjadi hambatan, seperti;

- a. Minimnya atau terbatasnya modal usaha yang dimiliki sehingga pengelolaan usaha tersebut masih dalam skala kecil. Kurangnya modal yang dimiliki tentu berdampak pada peralatan yang digunakan juga relative masih terbatas (cenderung masih manual), sehingga produktivitas dari usaha tersebut relative masih terbatas. Dibutuhkan program-program dari instansi terkait untuk pengembangan usaha-usaha yang dikelolah atau dimiliki warga transmigrasi, seperti; bantuan modal usaha atau peralatan/mesin.
- b. Jaringan pemasaran yang terbatas (belum ada) menyebabkan produksi usaha warga transmigrasi sangat susah berkembang karena hanya dipasarkan pada daerah sendiri dan atau sekitar daerah produksi, sehingga dapat dipastikan bahwa konsumen atau pengguna produk tersebut masih dalam skala yang kecil. Dibutuhkan suatu jaringan pemasaran yang berskala besar termasuk promosi dalam rangka memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh warga transmigrasi, seperti hasil produksi kerajinan, dan lain sebagainya. Instansi terkait perlu membuat program promosi dan membangun jaringan pemasaran dengan lembaga-lembaga yang telah mapan dan pengalaman dalam memasarkan hasil-hasil produk. Untuk promosi dan jaringan pemasaran yang lebih baik dituntut penguasaan atau pengetahuan teknologi bagi warga transmigrasi, hal tersebut dapat difasilitasi oleh instansi terkait, seperti; dinas transmigrasi, dinas pariwisata dan usaha kreatif.
- c. Pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keterampilan, bila perlu magang pada usaha-usaha yang telah berhasil pada daerah-daerah lain. Hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan inovasi produk-produk yang dihasilkan, disamping itu dengan keterampilan-keterampilan baru maka skala produksi akan lebih besar, hasil produksi akan lebih berkualitas dan lebih cepat. Untuk hal ini dibutuhkan peran dari instansi terkait untuk membuat program pelatihan maupun magang bagi warga transmigrasi sesuai dengan kebutuhan keterampilan untuk peningkatan produksi.

3. Strategi Intensifikasi dan Integrasi Lahan

Sumber daya yang dimiliki warga transmigrasi diberbagai daerah di Kabupaten Konawe Utara relative terbatas, sehingga dibutuhkan maksimalisasi sumber daya yang ada. Lahan-lahan yang dimiliki harus mendapat perlakuan yang khusus agar memberikan atau menghasilkan produktivitas yang tinggi.

Produktivitas yang tinggi dapat tercapai bila warga transmigrasi dapat melakukan strategi intensifikasi lahan. Intensifikasi lahan dapat dilakukan dalam berbagai varian, seperti; pemilihan tanaman yang cocok, pemanfaatan lahan dengan baik, integrasi dengan berbagai tanaman serta integrasi antara tanaman dan peternakan (sapi, kambing dan ayam). Berikut pilihan strategi intensifikasi yang dapat ditempuh oleh warga transmigrasi;

- **Strategi Integrasi antara pertanian dan peternakan**

Integrasi antara tanaman dan sapi atau kambing merupakan salah satu alternative yang dapat dilakukan oleh warga transmigrasi di berbagai wilayah di Kabupaten Konawe Utara. Integrasi sapi dengan tanaman hortikultura relatif mudah dilaksanakan, bila kedua usaha dikendalikan dan dikelola dalam satu wadah. Jenis ternak sapi yang di pelihara dapat dipilih sapi bali hal tersebut dikarenakan sapi bali adalah jenis sapi yang dapat beradaptasi dengan baik, disamping itu dapat memanfaatkan pakan dengan kualitas rendah dan memiliki fertilitas yang cukup tinggi. Hal lain adalah sapi bali mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Adanya sistem pertanian terpadu atau integrasi akan mampu meningkatkan pendapatan warga transmigran. Ketika harga sayur atau tanaman lain mengalami penurunan harga atau terjadi gagal panen maka warga transmigrasi masih mempunyai sumber penghasilan atau pendapatan lain, seperti dari ternak sapi, kambing, ayam. Dengan integrasi lahan tersebut akan memberikan nilai tambah bagi warga transmigrasi, sehingga tidak hanya fokus atau tergantung pada satu sumber pendapatan.

Integrasi tersebut akan dapat terwujud bila didukung adanya program lintas instansi atau dinas-dinas terkait, seperti; penyediaan ternak dapat dilakukan oleh dinas peternakan atau pertanian dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Tentunya, program tersebut harus didukung oleh kemampuan warga transmigrasi dalam melakukan integrasi tersebut, sehingga program tersebut harus memperhatikan aspek keterampilan atau pengetahuan warga transmigrasi dengan cara pemberian pelatihan. Peran penyuluh juga sangat diharapkan dalam memberikan pemahaman mengenai integrasi tersebut.

- **Strategi Pemilihan Komoditas Usahatani**

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh warga transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara merupakan suatu fakta sosial yang harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara sehingga warga transmigrasi tidak menjadi “beban sosial” dalam jangka panjang, tetapi dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah.

Keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti; aspek permodalan, luasan lahan, keterampilan serta jaringan pemasaran harus mendapatkan solusi yang tepat agar keterbatasan tersebut tidak menjadi hambatan untuk peningkatan pendapatan warga transmigrasi. Salah satu alternative strategi yang dapat ditempuh adalah pemilihan komoditas yang tepat, seperti yang dikemukakan dalam Matriks Haris dengan model matriks 2x2. Matrik tersebut akan memberikan pilihan strategi yang tepat berdasarkan kepemilikan luas lahan dan modal.

Berdasarkan gambar 1, maka strategi yang dapat dilakukan warga transmigrasi dalam meningkatkan pendapatan dari lahan yang sempit serta keterbatasan modal adalah strategi intensifikasi produksi/*baby product*. Dalam kondisi warga transmigrasi memiliki keterbatasan modal dan lahan, maka dasar pemikiran strategi ini adalah bagaimana warga transmigrasi dapat memperoleh manfaat dari lahan yang dimiliki atau tersedia secara berkali-

kali. Karakter dari tanaman yang diusahakan haruslah tanaman yang memiliki usia pendek/dapat dipanen dalam waktu singkat dibanding komoditas pertanian yang lain, sehingga lahan yang ada dapat digunakan berkali-kali, menghasilkan/panen berkali-kali.

Gambar 1 Matrik Haris

Strategi Pemilihan Komoditas Komersial yang Ditanam Petani		Kepemilikan Lahan	
		Sempit	Luas
Penguasaan atas Modal	Sedikit	Intensifikasi produksi/ baby product	Masukan rendah
	Besar	Komoditi unik	Teknologi tinggi

Warga transmigrasi dapat melakukan panen berkali-kali pada lahan sempit yang dimilikinya, sehingga warga transmigrasi dapat memperoleh akumulasi pendapatan yang lebih banyak karena diperoleh secara berkali-kali dari lahan sempit yang diusahakannya.

Manfaat dari diterapkannya strategi ini adalah petani lebih memungkinkan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan jangka pendeknya. Komoditas-komoditas yang dapat dipilih oleh warga transmigrasi dalam sel satu (intensifikasi produksi) adalah komoditas yang berumur pendek, atau komoditas yang dapat dipanen meskipun masih kecil/muda atau biasa disebut dengan *baby product*. Komoditas *baby product* saat ini sudah ada pasar tersendiri karena pada komoditas *baby product* memiliki perbedaan tekstur dan zat gizi dengan produk yang dipanen tua. Memilih sistem penanaman yang berorientasi panen muda (*baby product*) pula memiliki keunggulan dalam hal jarak tanam yang lebih rapat, sehingga jumlah tanam persatuan luas menjadi lebih.

Komoditas yang dapat dipanen pada usia muda (*baby product*) harus termasuk dalam kelompok biji-bijian. Beberapa alternatif komoditas yang dapat dijadikan sebagai komoditas *baby product* adalah: kacang panjang muda, jagung muda, terong muda, kecipir muda, mentimun muda, pare muda, wortel muda, serta sayuran muda.

4. PENUTUP

Simpulan

Strategi atau upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi yaitu; pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi, penguasaan keterampilan dan teknologi, strategi intensifikasi dan integrasi lahan (strategi integrasi antara pertanian dan peternakan dan strategi pemilihan komoditas usahatani).

Saran

Untuk meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara maka pemerintah kabupaten harus mengambil langkah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga ekonomi, seperti kelompok tani dan koperasi, agar warga transmigrasi memiliki wadah yang dikelola secara mandiri, profesional untuk meningkatkan nilai tawar warga transmigrasi.
- 2) Pelatihan dan magang untuk suatu keterampilan perlu dilakukan pemerintah daerah agar warga transmigrasi memiliki “bekal” yang menjadi alternatif mata pencaharian.
- 3) Pemerintah daerah harus membuat program yang lebih pro terhadap warga transmigrasi, seperti; bantuan modal usaha, bibit yang unggul dan pupuk, peralatan usaha dan peternakan.
- 4) Peranan penyuluh harus lebih diintensifkan, hal ini karena tingkat pendidikan warga transmigrasi relative masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Ichwan, 1992, *Analisis Kemiskinan di Pedesaan Sumatra Utara*, Dalam Harian Mimbar Umum 24 Januari 1992, Medan.
- Ismail, Zarmawis, 1999, *Masalah Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh di Perkotaan: Kasus Yogyakarta dan Surabaya* PUSLITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, LIPI, Jakarta.
- Juoro Umar, 1985, *Masalah Terdepan dalam Pembangunan Indonesia*, Alumni Bandung.
- Kadir Abdul, H.M. 1993, *Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur dalam Repelita VI*, Makalah disampaikan pada Seminar Pemasyarakatan Inpres IDT, Universitas Brawijaya, Malang
- Milles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif*, Edisi Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (2000), “Introduction: Social Policy and Social Welfare” dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan
- Michelle Livermore (ed), *The Handbook of Social Policy*, London: Sage, halaman xi-xv
- Mubyarto, 1990, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, cetakan kedua, LPES, Jakarta.
- Salim, Emil 1984, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta P.T.Pustaka LP3ES
- Simanjuntak, Payaman, 1993, *Produktivitas Kerja: Pengertian dan Ruang Lingkupnya*, dalam Prisma, edisi Nov-Des.
- Suud, Mohammad. 2006. *3 (Tiga) Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Suparlan, Parsudi, 1993, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Jakarta 1993
- Sen. Amarcya. 2002. *Rationality and Freedom*. Cambridge: Harvard University Press
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Swasono, Sri-Edi, 2004, a, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, UNJ Press, Jakarta
- Zadjuli, Suroso Imam, 1993, “ *Masalah Kemiskinan di Indonesia dan Pembangunan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang di Surabaya, 5 Agustus 1993